ONOMI
ANGUNAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDRALAYA

SKRIPSI

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DALAM ERA OTONOMI DAERAH

Oleh

ADY WIRDIANSYAH
01003120044

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2006

7
1

S
658.150 7
Wir
a
2006

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDRALAYA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT
PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DALAM ERA OTONOMI DAERAH

Oleh

ADY WIRDIANSYAH
01003120044

R.15737
15499

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2006

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

SKRIPSI

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DALAM ERA OTONOMI DAERAH

Diajukan Oleh :

ADY WIRDIANSYAH
01003120044

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Komprehensif
Pada tanggal 13 November 2006
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima
Panitia Ujian Komprehensif

Ketua	Anggota	Anggota
Drs. M. Umar Nuh	Drs. M. Syirod Saleh, Msi	Drs. H. M. Hibzon MB
NIP : 130353380	NIP : 131412510	NIP : 131673861

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Drs. Suhel, M.Si
NIP : 131993979

Motto :

" Ingatlah, Hanya Dengan Mengingat Allah SWT Hatimu Menjadi Tenteram "
(QS. Ar-Ra'd : 28)

" Kesuksesan adalah sesuatu yang di ingat sesaat, sedangkan kesalahan akan di ingat selamanya "
(Josune Bereziartu, Prancis)

Kupersembahkan Kepada :

- Kedua Orang Tuaku Tercinta
- Saudara-saudaraku Tersayang
- Kakek & Nenekku (alm)
- Sahabat-sahabatku
- The Girl Who Change My Life
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadapan Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Era Otonomi Daerah ".

Pokok dari skripsi ini menjelaskan derajat otonomi Kabupaten Musi Banyuasin yang ditekankan pada derajat desentralisasi, bantuan dan posisi fiskal serta faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Kabupaten Musi Banyuasin sebagai daerah otonom dengan kemajuan pembangunan yang cukup pesat serta memiliki potensi besar bagi pengembangan berbagai aspek ekonomi sangat menarik untuk diteliti, mengingat masih kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah baik dari pembiayaan pembangunan maupun APBD secara keseluruhan.

Sistematika penyajian skripsi hasil penelitian ini dibuat dalam 4 (empat) bab dengan urutan : Bab I Pendahuluan, Bab II Gambaran Umum Kabupaten Musi Banyuasin, Bab III Pembahasan, Bab IV Kesimpulan dan Saran.

Penulis sadar bahwa hasil dari penelitian ini tidak dapat dikatakan sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan atau kelemahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun. Akhirnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaatnya bagi kita semua. Amin.

Inderalaya, Oktober 2006

Ady Wirdiansyah

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T karena atas rahmat dan Hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Era Otonomi Daerah" dalam rangka menyelesaikan tugas akhir untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini, yakni kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Zainal Ridho Djafar, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. Syamsurijal Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Drs. Suhel, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya, yang senantiasa memberikan dorongan untuk segera meraih gelar sarjana.
4. Drs. M. Umar Nuh selaku Pembimbing Skripsi I, yang telah memberikan nasehat dan masukan dalam proses penulisan skripsi dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini dengan baik.
5. Drs. M. Syirod Saleh, M.Si selaku Pembimbing Skripsi II, yang telah bersabar membimbing dan mengarahkan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini dengan baik.

6. Drs. H. M. Hibzon MB selaku dosen tamu penguji komprehensif.
7. Seluruh Bapak / Ibu Dosen yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
8. Karyawan/ti Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis (khususnya Ibu Semi dan Yuk Ita).
9. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta nasehat yang membuat penulis untuk bertahan dan tidak mudah menyerah hingga dapat menyelesaikan studi ini.
10. Kakak-kakakku dan adikku (aak, acik dan Teli) yang telah memberikan masukan dan dan bantuan disaat susah maupun senang selama ini serta kakek dan nenekku (alm).
11. Staf pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Staf Pegawai BPS Kabupaten Musi Banyuasin yang telah memberikan bantuan data.
12. Seluruh teman-temanku Jurusan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2000 yang bersedia berbagi suka dan duka dalam proses perkuliahan, jangan lupo kawan lamo Jok !!!.
13. Senior EP dan adik-adik EP yang selalu mendorong untuk segera menyelesaikan studi ini, terimakasih atas dukungannya (1 nusa 1 bangsa, 1 jurusan tetap bersatu).
14. Rekan-rekan Seperjuangan, Bambang, Dian Poksai bin Kijang, Bram, Irvan, Al Karmani sloow ..... biar lambat yang penting tamat, dan Agus Jolor (jangan idak tamat, Lur).

15. Teman-teman EP '00 Tedi 5watt (... mokasih nian wak), Hose kusut, Ijal Gomez, Norman kudo nil, Aan, Manto', Paian, Labet cibur, Kempeng, Adi Y, yang telah memberikan dukungan dan nasehat (biar kadang-kadang idak masuk akal, he...86x).
16. Sahabat-sahabatku, Cek Den A,Md, maHok SE, Dadang SH, Tata SE, Semeirin Bak's A,Md, Gedek's A,Md, Koentit A,Md, Ujang Bistek, Mamik, Olga, De2t, Ko2, Yogi, Amit, ... mekasih nia Yung !!!!!
17. Seseorang yang pernah menyayangiku dan telah memberikan motivasi agar segera menyelesaikan skripsi ini (thanks ye ri, ... ☺). Mbak Yuli, mohon maaf kalu ado salah & mokasih doanyo.
18. Komputerku (walau badai menghadang, ...), sound system 100.000 w.pmpo yang tanpa henti mengalunkan simfoni merdu serta BG 3879 NN yang menemani setiap langkahku dan selalu menjadi buronan dealer ... he13x, dan Awie Cellular yang telah memberiku pelajaran tentang arti hidup.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu selama perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT memberikan balasan atas budi baiknya dan berkah kepada kita semua, Amin.

DAFTAR ISI

Judul i

Persetujuan Skripsi ii

Lembar Pengesahan iii

Motto dan Persembahan iv

Kata Pengantar v

Ucapan Terima Kasih vi

Daftar Isi ix

Daftar Tabel xii

Abstraksi xv

Abstract xvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Perumusan Masalah 6

1.3. Tujuan Penelitian 7

1.4. Manfaat Penelitian 7

1.5. Kerangka Teori 7

1.6. Penelitian Terdahulu 13

1.7. Metodologi Penelitian 16

1.7.1. Ruang Lingkup Penelitian 16

UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 070444
TANGGAL : 27 MAR 2007

1.7.2. Metode Pengumpulan Data 16

1.7.3. Teknik Analisis 16

1.8. Batasan Variabel 19

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1. Kondisi Geografis 21

2.2. Keadaan Penduduk 22

2.3. Kondisi Perekonomian Kabupaten MUBA 25

2.3.1. Pertumbuhan Ekonomi 25

2.3.2. Perkembangan PDRB 31

2.3.3. Pendapatan Perkapita 33

2.4. Keadaan Keuangan Daerah Kabupaten MUBA 34

2.4.1. Perkembangan APBD Kabupaten MUBA 34

2.4.2. Perkembangan PAD Kabupaten MUBA 35

BAB III ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

3.1. Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten MUBA 38

3.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keuangan Daerah 49

3.2.1. Pendapatan Asli Daerah 51

3.2.2. Dana Perimbangan 67

3.2.3. Pinjaman Daerah 69

3.2.4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 69

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan 71

4.2. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten MUBA Tahun 1995 - 2004 23

Tabel 2.2 Jumlah, Kepadatan Penduduk dan Luas Daerah Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Musi Banyuasin 24

Tabel 2.3 PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (1995 - 2004) 29

Tabel 2.4 PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (1995 - 2004) 30

Tabel 2.5 Perkembangan PDRB di Kabupaten MUBA (1995-2004) 32

Tabel 2.6 Perkembangan Pendapatan Perkapita di Kabupaten MUBA Dengan Migas Tahun 1995 - 2004 33

Tabel 2.7 Perkembangan Pendapatan Perkapita di Kabupaten MUBA Tanpa Migas Tahun 1995 - 2004 34

Tabel 2.8 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten MUBA Tahun 2000/2001 - 2004/2005 37

Tabel 3.1 Realisasi Anggaran Belanja Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 1995/1996 - 2004/2005 39

Tabel 3.2 Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 1995/1996 - 2004/2005 40

Tabel 3.3 Realisasi Pengeluaran Pembangunan Daerah Otonom Kabupaten MUBA Tahun 2000/2001 - 2004/2005 42

Tabel 3.4 Kontribusi Penerimaan Daerah Terhadap Total APBD 46

Tabel 3.5 Kontribusi PAD Terhadap Total Pengeluaran Rutin Kabupaten MUBA 47

Kontribusi PAD + BHPBP Terhadap Total Pengeluaran Rutin Kabupaten MUBA 47

Tabel 3.6 Pertumbuhan PAD dan PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 1995/1996 - 2004/2005 48

Tabel 3.7 Perkembangan Pencapaian Target PAD Kabupaten MUBA Tahun 1995/1996 - 2004/2005 52

Tabel 3.8 Keefektifan Pemungutan PAD di Kabupaten MUBA Tahun1995/1996 - 2004/2005 53

Tabel 3.9 Efisiensi Pemungutan PAD di Kabupaten MUBA Tahun 1995/1996 - 2004/2005 54

Tabel 3.10 Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten MUBA Tahun 1995/1996 - 2004/2005 57

Tabel 3.11 Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten MUBA
Tahun 1995/1996 - 2004/2005 63

Tabel 3.12 Penerimaan Bagi Hasil Perusahaan Milik Daerah
di Kabupaten MUBA Tahun 1995/1996 - 2004/2005 65

Tabel 3.13 Penerimaan Lain-lain PAD di Kabupaten MUBA
Tahun 1995/1996 - 2004/2005 67

Tabel 3.14 Penerimaan Sumbangan dan Bantuan Pemerintah Pusat
Terhadap APBD di Kabupaten MUBA
Tahun 1995/1996 - 2004/2005 68

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis kinerja keuangan daerah di Kabupaten Musi Banyuasin dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah serta sejauh mana pengaruh faktor-faktor PAD berdasarkan keefektifan dan efisiensi.. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang dapat menerangkan besar kecilnya derajat desentralisasi, bantuan dan posisi fiskal Kabupaten Musi Banyuasin. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) MUBA, Badan Pusat Statistik, Badan Perencanan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan instansi terkait lainnya.

Kerangka pemikiran yang mendasari kajian terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten Musi Banyuasin antara lain menurut konsep Musgrave dan Musgrave, 1980; 546-551 yang diformulasikan dalam : 1) Derajat Desentralisasi Fiskal, 2) Kebutuhan Fiskal, 3) Kapasitas Fiskal dan 4) Upaya Fiskal (Halim, 2001) dan rumus efektifitas dan efisiensi. Teknik analisis menggunakan pendekatan secara kualitatif yang bersifat deskriptif dan secara kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Derajat Desentralisasi Fiskal selama kurun waktu sepuluh tahun (1995-2004) sebesar 4 %, sedangkan kontribusi PAD + Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap PDRB sebesar 36 % yang berarti ketergantungan Pemerintah Kabupaten terhadap Pemerintah Pusat sangat tinggi. Kebutuhan Fiskalnya dilihat dari PAD sebesar 7 % jka ditambah Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak mencapai 27 %. Kapasitas Fiskal relatif baik jika dibandingkan dengan Standard Fiskal rata-rata Kabupaten/Kota se sumatera Selatan, dan untuk posisi Fiskal jika digunakan PDRB konstan sebesar 23,29 % dan bila menggunakan PDRB berlaku sebesar 1,88 %.

Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PAD Kabupaten Musi Banyuasin dikemukakan beberapa temuan antara lain bahwa indikator keuangan daerah menurut keefektifan pemungutan PAD sebesar 106,64 % dengan standard asumsi apabila sama atau lebih dari 100 % efektif, maka pemungutan PAD di Kabupaten MUBA adalah efektif. Efisiensi biaya pemungutan sebesar 4,10 % dengan standard asumsi apabila mendekati 100 % berarti tidak efisien, maka biaya pemungutan PAD di Kabupaten MUBA sudah efisien.

ABSTRACT

This Research aim to measure and analyse the performance of area finance in Regency of Musi Banyuasin and to know the factors influencing Original Earnings of Area and also how far influence factors PAD of pursuant to effectiveness and effisiensy. This research is expected can become the information substace which can explain the degree effect of decentralization, fiscal position and aid of Regency Musi Banyuasin. Data which is used in this research is data sekunder obtained from Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) MUBA, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) and other related institution.

Opinion framework constitutoing study to performance of area finance in Regency Musi Banyuasin for example according to concept of Musgrave and Musgrave, 1980; 546-551 which is formulated in 1) Fiscal Decentralization Degree 2) Fiscal Requirement 3) Fiscal Capacities and 4) Fiscal Effort (Halim, 2001) and formula of efektifitas and efficiency. Technique analyse to use the approach qualitative having the character of descriptive and quantitatively.

Result of research indicate that Degree of Fiscal Decentralization during range for ten years (1995-2004) equal to 4 %, while contribution PAD + Sharing Holder of lease and Non lease to PDRB of equal to 36 % meaning Governmental depending of regency to Central Government very high. Fiscal Requirement its seen from PAD of equal to 7 % if added by Sgaring Holder of lease and Non lease reach 27 %. Good Fiscal Capacities relative in comparison with Fiscal Standard of Regency mean / town of South sumatera, and for the position of Fiscal if used by constant PDRB equal to 23,29% and using PDRB go into effect equal to 1,88%.

Pursuant to result analyse the factors influencing acceptance PAD of Regency Musi Banyuasin opened by some finding for example that indicator of area finance according to effectiveness of collection PAD of equal to 106,64 % with the assumption standard is equal or more than 100 % is effective, hence collection PAD in Regency MUBA is effective. Efficiency collection expense of equal to 4,10 % with the assumption standard of coming near 100 % meaning inefficient, hence expense of collection PAD in Regency MUBA has efficient.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan pergantian rezim pemerintahan dari Orde Baru menuju Orde Reformasi, strategi pembangunan mulai berubah ditandai dengan diterapkannya kebijaksanaan Otonomi Daerah. Hal ini memungkinkan bagi setiap daerah untuk memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki untuk dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah.

Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22/1999, yang disahkan pada tanggal 7 Mei 1999, berisi tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan Undang-Undang nomor 25 /1999, yang disahkan pada. tanggal 19 Mei 1999, berisi tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang ini lahir sebagai tanggapan dan sekaligus pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 4/1974, tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tersebut selama ini dianggap belum mampu mengatur masalah hubungan Pusat dan Daerah. Kecenderungan yang terjadi adalah justru eksploitasi sumber daya daerah oleh Pemerintah Pusat.

Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 telah mulai diberlakukan mulai Januari 2001. Dengan pemberlakuan ini maka Daerah mempunyai kekuasaan

dalam melaksanakan pembangunannya. Ini berarti keputusan di bidang keuangan mayoritas akan ditangani oleh Pemerintah Daerah, baik di bidang perencanaan, pengendalian, maupun sumber pendanaannya. Khusus aspek yang bersifat krusial dan sangat vital, seperti pertahanan dan keamanan, hubungan luar negeri dan kebijakan mata uang, tetap di bawah kendali Pemerintah Pusat (Warsono, 2000 ; 25).

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak itu diperoleh melalui penyerahan urusan dari Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya sesuai dengan keadaan, kemampuan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Artinya secara prinsip kekuasaannya masih dipegang negara. Hasil yang diharapkan dari otonomi adalah pemberian pelayanan publik yang lebih memuaskan, pengakomodasian partisipasi masyarakat, pengurangan beban pemerintah pusat, pertumbuhan kemandirian dan kedewasaan daerah serta penyusunan program pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu ditetapkan Undang-Undang baru tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Komponen sumber penerimaan daerah menurut Bab IV pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 adalah :

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan, dan

c. Lain-lain Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Kemudian Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, kemudian lain-lain Pendapatan terdiri atas Pendapatan Hibah dan Pendapatan Dana Darurat.

Tuntutan reformasi disegala bidang yang didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam menyikapi berbagai permasalahan daerah akhir-akhir ini membawa dampak terhadap hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Otonomi yang luas serta perimbangan keuangan yang lebih adil, proporsional dan transparan antar tingkat pemerintahan menjadi salah satu tuntutan daerah dan masyarakat.

Konsekuensi dari pelaksanaan ke dua Undang-Undang tersebut adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain, saat ini kemampuan keuangan beberapa Pemerintah

Daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu bersamaan dengan semakin sulitnya keuangan negara dan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, maka kepada setiap daerah dituntut harus dapat membiayai diri melalui sumber-sumber keuangan yang dikuasainya. Peranan Pemerintah Daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah (Halim, 2001 ; 21).

Selanjutnya, berkaitan dengan hakekat ekonomi daerah yaitu yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasikan sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Penerapan Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab, peluang sekaligus tantangan kepada daerah agar dapat menggali potensi-potensi Sumber Daya Alam (*natural resouces*) dalam upaya mengoptimalisasikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berkaitan dengan penyerahan sebagian besar wewenang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri, meliputi, wewenang pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keuangan seperti tertuang dalam

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang, otonomi daerah dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan pendapatan juga sangat besar.

Sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah: pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta pembagian keuangan pusat dan daerah. Di samping itu penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemerintah daerah mempunyai hak atau diberi otonom baik dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di daerahnya masing-masing. Pemberian otonomi dititikberatkan pada Daerah Tingkat II dalam hal ini kabupaten dan kotamadya. Pertimbangannya adalah model daerah otonomi itu Daerah Tingkat II merupakan paling dekat dengan masyarakatnya, karena Daerah Tingkat II lebih mengetahui pemasalahan yang dihadapi masyarakatnya (Ali Akbar, 2002 ; 3).

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki Sumber Daya Alam potensial, yang dapat digali secara profesional guna meningkatkan PAD dalam pelaksanaan otonomi daerah terutama di sektor pertambangan, pertanian, industri, dan perdagangan.

Di dalam pelaksanaan otonomi bagi daerah kabupaten/kota termasuk Musi Banyuasin, masih banyak kendala-kendala yang dihadapi serta masih banyak juga urusan yang belum sepenuhnya diserahkan kepada daerah kabupaten/kota. Peningkatan jumlah urusan tersebut nampaknya bergantung pada. kemampuan daerah serta inisiatif propinsi dari daerah tersebut.

Di sisi lain daerah kabupaten/kota masih sangat tergantung pada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terutama dalam hal pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan, karena penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum dapat diandalkan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk memilih judul "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Era Otonomi Daerah".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Mengukur dan menganalisis tingkat kinerja keuangan daerah terhadap derajat desentralisasi otonomi fiskal daerah di Kabupaten Musi Banyuasin.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA UPT PERPUSTAKAAN

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin dalam era otonomi daerah.
2. Untuk mengukur dan menganalisis derajat otonomi Kabupaten Musi Banyuasin yang ditekankan pada derajat desentralisasi, bantuan dan posisi fiskal.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas Sriwijaya khususnya Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan dapat menambah kelengkapan kepustakaan dan sebagai bahan perbandingan penulisan skripsi bagi yang memerlukan.
2. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat menjadi landasan dalam penyusunan kebijaksanaan mengenai keuangan daerah.
3. Bagi penulis, sebagai karya penulisan dalam rangka memenuhi syarat dalam penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa pada Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Sriwijaya.

1.5 Kerangka Teori

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah didasarkan pada prinsip-prinsip pemberian otonomi yang nyata dan bertanggung jawab yang didalam

pelaksanaannya dilakukan bersama-sama antara asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Prinsip-prinsip dasar dari penyelenggaraan pemerintahan di daerah (Muang, 1996 ; 59) adalah :

1. prinsip digunakannya asas desentralisasi dan dekosentrasi, maka dibentuk dan disusunlah suatu daerah yang sekaligus diberi otonomi
2. prinsip asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan dekosentrasi yang memungkinkan dilaksanakannya tugas pembantuan
3. prinsip otonomi yang titik beratnya diletakkan pada Daerah Tingkat II
4. prinsip otonomi di samping mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan juga mengutamakan aspek pendemokrasian
5. prinsip lainnya dalam. pemberian otonomi melalui pembentukan dan penyusunan daerah serta penyerahan urusan adalah prinsip memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Tujuan otonomi daerah (Smith, 1985) dalam analisa (CSIS) yang dikemukakan oleh Syarif Hidayat yang dibedakan dari dua sisi kepentingan, yaitu kepentingan Pemerintah Pusat dan kepentingan Pemerintah Daerah. Dari Kepentingan Pemerintah Pusat tujuan utamanya adalah pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Sementara, bila dilihat dari sisi kepentingan pemerintah daerah mempunyai tiga tujuan (Halim, 2001 ; 23) sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan *political equality*, artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal ataupun daerah.
2. Untuk menciptakan *local accountability*, artinya dengan otonomi akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat.
3. Untuk mewujudkan *local responsiveness*, artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Selanjutnya jika di lihat dari tujuan otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pada dasarnya adalah sama yaitu otonomi daerah yang diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, paling tidak ada empat parameter yang menjadi faktor penilaian dan perlu dievaluasi pada tingkat keberhasilannya. Keempat faktor tersebut adalah (a) kemampuan keuangan daerah, (b) kemampuan sumber daya manusia, (c) kemampuan sumber daya alam, (d) kemampuan institusi (Afattah, 2001 ;4).

Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya bisa diukur melalui kinerja keuangan daerah dengan perhitungan (Hikmah, 1999) sebagai berikut :

1. Derajat Desentralisasi Fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.
2. Kebutuhan Fiskal (*fiscal need*) dengan menghitung Indeks Pelayanan Publik Perkapita (IPPP).
3. Kapasitas Fiskal (*fiscal capacity*).
4. Upaya Fiskal (*tax effort*) atau posisi fiskal.

Berdasarkan prinsip otonomi yang dianut maka otonomi dititik beratkan pada Daerah Tingkat II. Hal ini tentunya berdasarkan pada beberapa pertimbangan politis, fanatisme kedaerahan misalnya sulit dibangun dari masing-masing DATI II. Sementara dari segi administratif pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dilaksanakan di DATI II, selanjutnya DATI II merupakan ujung pelaksanaan pembangunan.

Para ahli mengemukakan bahwa ada empat hal penting yang dijadikan pertimbangan untuk menilai suatu daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri (Thoha, 1985 ; 27) yaitu :

1. adanya urusan-urusan yang diserahkan pemerintah atasannya
2. pengaturan dan pengurusan urusan tersebut dilakukan atas inisiatif dan kebijaksanaan sendiri
3. untuk mengatur urusan tersebut diperlukan perlengkapan atau aparatur sendiri

4. untuk membiayai urusan yang diserahkan itu diperlukan sumber keuangan sendiri.

Keuangan daerah merupakan masalah sentral dalam membicarakan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Tingkat II, karena tanpa dukungan keuangan pelaksanaan otonomi tersebut tidak akan berjalan memuaskan. Hal ini juga harus ditunjang dengan aparatur dan lembaga yang berkualitas.

Sumber dana Pemerintah Daerah, menurut pasal 79 Undang-Undang Nomor 22/1999 diistilahkan dengan sumber pendapatan. Sumber pendapatan pemerintah menurut pasal tersebut terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
   a. Hasil pajak daerah
   b. Hasil retribusi daerah
   c. Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
   d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana perimbangan
3. Pinjaman daerah dan
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan komposisi sumber-sumber keuangan daerah itu dapatlah dilihat bahwa suatu daerah dalam pelaksanaan otonomi telah mampu atau belum. Dapat juga dilihat apakah suatu daerah mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat atau atasan. Komposisi dan besarnya sumber penerimaan

daerah serta pengeluaran daerah tercermin di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam APBD ini pula dapat dilihat berapa besar pengeluaran untuk pembangunan dan dari mana sumber pembiayaannya.

Menurut Undang-Undang Otonomi Daerah 1999, bahwa Pemerintah Daerah dapat meminjam dana dari pihak lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam pasal 81 Undang-Undang 22/1999 dan pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 25/1999. Secara lengkap pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 25/1999 berisi 4 ayat sebagai berikut :

1. Daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri untuk membiayai sebagian anggarannya.
2. Daerah melakukan pinjaman dari sumber luar negeri melalui Pemerintah Pusat.
3. Daerah dapat melakukan pinjaman jangka panjang guna membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat; dan
4. Daerah dapat melakukan pinjaman jangka pendek guna pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan kas daerah.

Dalam menyongsong otonomi daerah, harus terpenuhinya sumber daya manusia daerah yang semakin berkualitas dan tercapainya peningkatan sumber-sumber keuangan daerah sedemikian rupa sehingga menghasilkan penerimaan yang cukup memadai tanpa mematikan daya tumbuh dan berkembangnya potensi

perekonomian masyarakat. Peningkatan etos kerja aparatur pemerintahan dan penghapusan praktek-praktek aturan yang bersifat monopoli, oligopoli dan persaingan yang tidak sehat yang merugikan rakyat.

Di dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, diperlukan aparat yang memadai, baik kualitas maupun kuantitas. Kualitas dan kuantitas aparat ini akan mempengaruhi kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya. Dilihat dari kuantitas, kemampuan aparat dapat ditinjau dari perbandingan aparat terhadap jumlah penduduk. Sebagai indikator kualitas aparat yang baik adalah yang berpendidikan sarjana dan sarjana muda untuk pendidikan formal, kalau untuk pendidikan informal adalah yang telah mengikuti kursus dan pelatihan.

Dengan peningkatan kualitas sumber daya daerah. baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, akan menunjang pertumbuhan ekonomi sehingga akan mendorong peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam melaksakan pembangunan daerah.

1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian Yuliati (1999) mengenai analisis kemampuan keuangan daerah dalam menghadapi otonomi daerah di Kabupaten Malang menyatakan bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selama kurun waktu lima tahun (1995 - 1999) sebesar 15%, sedangkan proporsi PAD ditambah BHPBP terhadap PDRB sebesar 29%. Ini menunjukkan ketergantungan

Pemerintah Kabupaten Malang terhadap Pemerintah Pusat sangat tinggi. Jika dilihat dari kemampuan PAD dalam mendanai belanja rutin daerah maka rata-rata selama lima tahun sebesar 32% dan jika ditanbah dengan BHPBP sebesar 62%. Ini berarti pembiayaan belanja rutin masih memerlukan bantuan dari pemerintah pusat. Kabupaten Malang memiliki Kapasitas Fiskal yang relatif baik dibandingkan dengan standar fiskal rata-rata Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

Penelitian Jasagung Hariyadi (2001) mengenai estimasi penerimaan dan belanja daerah serta derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Belitung menyatakan bahwa proporsi penerimaan PAD terhadap Total Penerimaan Daerah adalah sebesar 11,61%, proporsi penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Penerimaan Daerah sebesar 7,18% sedangkan proporsi sumbangan daerah dari pemerintah pusat (DAU) terhadap Total Penerimaan Daerah sebesar 81,21%. Ini berarti bahwa Kabupaten Belitung masih memiliki tingkat ketergantungan yang cukup besar pada pemerintah pusat.

Maulan Aklil (2003 : 45) dalam penelitiannya tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan PAD di Kabupaten OKI mengemukakan bahwa pendapatan perkapita, pajak, retribusi dan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan PAD di Kabupaten OKI.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Latief, Tunggul dan Ismarita (1997 : 77) mengenai potensi dan kendala peningkatan PAD di Kabupaten Blitar mengemukakan bahwa kendala-kendala yang dihadapi Kabupaten Blitar dalam meningkatkan PAD adalah kendala bersifat umum yaitu : struktur pemerintah daerah,

pelaksanaan otonomi daerah, sedangkan kendala yang bersifat khusus yaitu : letak geografis, peraturan perundang-undangan, kendala modal, dan kendala pendapatan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Zahari (2001 : 104) tentang analisis Pendapatan Asli Daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah di Kota Jambi mengemukakan bahwa pendapatan perkapita, keragaman sumber penerimaan pajak dan retribusi berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian Bamim (2002 : 450) tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Propinsi Sumatera Selatan mengemukakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, jumlah kendaraan bermotor secara signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian Silva Petrus (2001) mengenai analisa anggaran pendapatan daerah Kabupaten Sikka tahun anggaran 2001 menyatakan bahwa tingkat kemandirian daerah Kabupaten Sikka yang diukur melalui PAD, hanya mencapai 4,13%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sikka dalam rangka otonomi ditinjau dari kemampuan keuangan daerah adalah belum mampu.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini, maka tulisan ini terbatas dalam ruang lingkup daerah Musi Banyuasin (MUBA). Penelitian ini membahas mengenai derajat desentralisasi, bantuan dan posisi fiskal serta faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dan permasalahan yang berhubungan dengan variabel tersebut.

1.7.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan instansi-instansi terkait lainnya. Untuk mendukung penelitian ini selain pengumpulan data sekunder, untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan landasan teori penelitian sebelumnya dan model analisis dilakukan Study Pustaka (*library research*) dengan memanfaatkan berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.7.3 Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan dan membahas masalah yang ada secara kualitatif dengan bantuan statistik deskriptif. Penulis juga menggunakan teknik analisis kuantitatif.

Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya bisa diukur melalui kinerja / kemampuan keuangan daerah. Berikut ini disampaikan beberapa alat analisis kinerja keuangan daerah yang didasarkan pada

konsep Musgrave dan Musgrave dalam bukunya Finance in Theory and Practise, 1980; 546-551 (Reksohadiprodjo, 2000 ; 24) yaitu :

1. Kebutuhan Fiskal (*fiscal need*) dirumuskan sebagai berikut :

   NJ = Ns Zj

   Nj = kebutuhan fiskal juridiksi j

   Ns = biaya menyediakan tingkat pelayanan

   Zj = populasi target

2. Kapasitas Fiskal (*fiscal capacity*) dirumuskan sebagai berikut :

   Cj = ts Bj

   Cj = kapasitas fiskal juridiksi j

   ts = tarif fiskal standard

   Bj = basis fiskal di j

3. Upaya Fiskal (*fiscal effort*) dirumuskan sebagai berikut :

$$Ej = \frac{tj\ Bj}{ts\ Bj} = \frac{tj}{ts}$$

   Ej = upaya fiskal

   tj = tarif fiskal

   ts = standar fiskal

Namun karena data di daerah tidak mendukung maka di pakai berbagai *proxy*. Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya bisa diukur melalui kinerja keuangan daerah dilakukan dengan

perhitungan (Hikmah, 1999) sebagai berikut :

1. Derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah yaitu :

   a. $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}}$

   b. $\frac{\text{Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak untuk daerah (BHPBP)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}}$

   c. $\frac{\text{Sumbangan Daerah (SD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}}$

   Apabila hasil perhitungan Total Penerimaan Daerah (TPD) = PAD + BHPBP + SD besar maka desentralisasinya tinggi (mandiri), namun sebaliknya bila hasil perhitungan kecil berarti derajat desentralisasinya rendah (kurang mandiri).

2. Kebutuhan Fiskal (*fiscal need*) dengan menghitung Indeks Pelayanan Publik Perkapita (IPPP) dengan formula :

   a. $\text{IPPP} = \frac{\text{Pengeluaran Aktual perKapita untuk Jasa} - \text{jasa Publik (PPP)}}{\text{Standar Kebutuhan Fiskal Daerah (SKF)}}$

   b. $\text{SKF} = \frac{\text{Jumlah Pengeluaran Daerah / Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Kabupaten / Kota}}$

   c. PPP = Jumlah pengeluaran rutin dan pembangunan per kapita masing-masing daerah

   Bila perhitungan Indeks Pelayanan Publik Perkapita (IPPP) semakin tinggi hasilnya, maka kebutuhan fiskal suatu daerah semakin besar pula.

3. Kapasitas Fiskal (*fiscal capacity*) dengan formula :

   a. $\text{F} = \frac{\text{PDRB / Jumlah Penduduk}}{\text{Kapasitas Fiskal standar (KFs)}} \times 100\%$

b. $KFs = \frac{PDRB / Jumlah\ Penduduk}{Jumlah\ Kabupaten / Kota}$

Bila hasil Kapasitas Fiskal (F) hasilnya semakin tinggi, ini berarti kapasitas fiskal suatu daerah akan semakin tinggi juga.

4. Upaya Fiskal (*tax effort*) atau posisi fiskal dapat menggunakan rumus :

$$e = \frac{\Delta PAD}{\Delta PDRB}$$

Semakin elastis Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah, maka struktur Pendapatan Asli daerah (PAD) di daerah akan semakin baik.

1.8 Batasan Variabel

1. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Otonomi Daerah, 2001 ; 43).
2. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku (UU No. 25, 1999 ; 119).
3. Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah produksi barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu unit-unit produksi dalam periode tertentu selama satu tahun (Partadiredja, 27)
4. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya kepada pemerintah daerah untuk menjadi urusan rumah

tangganya sendiri.

5. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah (Otonomi Daerah, 1999 ; 4).
6. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan (Otonomi Daerah, 1999 ; 98).
7. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Otonomi Daerah, 1999 ; 97)
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Otonomi Daerah, 1999 ; 97).
9. Kontribusi adalah sumbangan atau memberikan sumbangan.
10. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka Negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah dan daerah secara proposal, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya (UU No. 25, 1999 ; 96).

DAFTAR PUSTAKA

Aklil, Maulana, 2003, "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu*", Fakultas Ekonomi Program Pasca Sarjana, Universitas Sriwijaya.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, 2004, *Realisasi dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.*

Bamim, Selamat, 2002, "*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Propinsi Sumsel*", Fakultas Ekonomi Program Pasca Sarjana, Universitas Sriwijaya.

Biro Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin, 2004, *Musi Banyuasin Dalam Angka.*

Davey. KJ, 1988, *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, UI Press, Jakarta.

Dumairy, 1996, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta : Erlangga.

Fattah, A, "Otoda, Peluang dan Tantangan MUBA", *Artikel Sumatera Ekspres*, 6 Februari 2001, Hal. 4.

Halim, Abdul, 2001. "*Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*", UGM, Yogyakarta.

Latief dkk, 1997, *Potensi dan Kendala Peningkatan Pendapatan Asli Daerah* (Studi Kasus di Kabupaten Blitar).

Mardiasmo, Dr. MBA,Ak, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : Andi.

Miftah Thoha, *Manajemen Pembangunan Daerah Tingkat II*, Prisma, Desember 1985.

Musyrif, 1999, "*Peranan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tk I Sumsel Dalam Mengelola Keuangan Daerah*", Palembang.

Nilawati, Umi dan Rika Lidyah, 2003, *Pengaruh Realisasi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Mendukung Otonomi Daerah*, FE. IBA. SB, Pordema.

Otonomi Daerah, UU No. 25 tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan pusat dan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.

Partadiredja, A, 1989, "*Perhitungan Pendapatan Nasional*", LP3ES, Jakarta.

Reksohadiprodjo, Sukanto, 2000, "Ekonomi Publik", *materi kuiliah*, MEP UGM, Yogyakarta.

Riwo Kaho. Josep, 1997, "*Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soedargo, 1984, "*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*", NV Eresco, Bandung.

Suparmoko, 2001, "*Ekonomi Publik Untuk Keuangan Daerah*", BPFE Yogyakarta.

Suparmoko, 1982, "*Asas-asas Keuangan Negara*", BPFE UGM, Yogyakarta.

Warsono, Municipal Bond Sebagai Sumber Dana Alternatif Bagi Pemerintah Daerah, Usahawan, No. 04 TH XXIV, April 2000, Hal. 25.

Zahari Ms, M, 2001, "Analisis PAD Dalam Rangka Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah". *Tesis*, Palembang.